

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih moderen. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain.

Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional. Ilmu Hubungan Internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda maupun kelompok, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan

kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek.

Studi Hubungan Internasional sebenarnya merupakan sebuah kajian yang telah lama ada, namun seperti yang dikatakan Fred Sonderman bahwa perkembangan dalam sebuah bidang studi berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang-bidang studi lain. Walaupun pada suatu waktu suatu bidang bisa mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat dari pada yang lain, kemajuan itu biasanya segera diikuti oleh bidang-bidang lainnya, ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, eksistensinya secara mandiri baru diakui pada sekitar tahun 1930-an terutama setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi Hubungan Internasional sebagai studi yang berelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana Hubungan Internasioanal yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik pada tingkat global (Darmayadi. 2015:17-18).

Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang sedang tumbuh berkembang. Dahulu dalam interaksinya hanya melibatkan aktor negara, namun sekarang aktor bukan hanya negara dapat terlibat dalam berinteraksi antar negara. Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abad ke-19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu diseperti masalah peperangan dan perdamaian (*war and peace*), maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah persoalan yang menyangkut

kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime*), upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya (Hermawan, 2008: 1-2).

Aktor hubungan internasional bisa saja merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara seperti yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa:

“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu” (Perwita&Yani, 2014: 4).

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan.

2.1.2 Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Le Roy A. Bannet dalam bukunya “*International Organization: Principles and Issue*”, organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi

internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya.

Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. Ketiga, hubungan antar suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Kementerian Kesehatan) dengan suatu cabang pemerintah di negara lain (seperti Kementerian Kesehatan atau Badan Intelejennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional (Perwita&Yani, 2014:97).

Sedangkan Konsep Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy menyatakan bahwa:

“Organisasi Internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda” (Rudy, 2005:50).

Berdasarkan definisi diatas, WHO dapat digolongkan sebagai organisasi internasional yang didirikan bersama melalui PBB yang pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara yang mempunyai misi untuk dijalankan disuatu

negara. Seperti dalam kerjasama kemitraan komprehensif ini misi WHO adalah untuk menyalurkan bantuan medis dalam berbagai bentuk pencegahan dan pengeliminasi melalui program-program dan pelatihan kepada negara anggotanya. Sedangkan Markas besar WHO terletak di di Jenewa, Swiss dan juga memiliki kantor perwakilan di tiap-tiap negara yang menjadi anggota WHO.

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional tentunya memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut A. Leo Roy Bannet adalah:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul kepermukaan (Perwita&Yani,2014:97).

Menurut teuku May Rudy, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator yang digunakan. Berikut ini penggolongan suatu organisasi internasional:

- a. Kegiatan administrasi
 1. Kegiatan Internasional Antar-Pemerintah (*intergovernmental organization*) yang disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, atau

instansi yang mewakili pemerintah suatu negara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.

2. Organisasi internasional non-pemerintah (*non-governmental organization*) yang disingkat NGO atau INGO (*international nongovernmental organization*), untuk membedakannya antara NGO yang internasional dan NGO yang ruang lingkupnya domestik (terdapat dalam suatu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

b. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan

1. Organisasi Internasional Global

Wilayah kegiatannya adalah global dan merupakan keanggotaan yang terbuka dan ruang lingkup diseluruh dunia.

2. Organisasi Internasional Regional

Wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaannya hanya diberikan pada kawasan-kawasan tertentu saja.

- c. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi

Untuk hal ini, pembangiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Lingkungan Hidup
3. Bidang Kesehatan
- d. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

1. Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum). Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu.
 2. Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus). Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja.
- e. Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan
1. Organisasi Internasional: Global-Umum
 2. Organisasi Internasional: Global-Khusus
 3. Organisasi Internasional: Regional-Umum
 4. Organisasi Internasional: Regional-Khusus
- f. Menurut Taraf Kewenangannya
1. Organisasi Supra-Nasional (*Supra-National Organization*)
 Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada diatas negara-negara anggota. Tidak ada contohnya, karena bentuk "*supranational organization*" belum pernah tercapai atau belum terealisasi dalam sejarah dunia modern. Dunia menganut pola banyak negara (*multy-state system*) masing-masing berdaulat.
 2. Organisasi dan Sederajat Satu Sama Lain
 Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Contoh, seperti PBB, ASEAN, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), OPEC (Organisasi Negara

Pengekspor Minyak, dan sebagainya. Karena semua organisasi internasional saat ini adalah berdasarkan kepada pola kerjasama, bukan supra-nasional (Rudy,2005:5-9).

2.1.3 Peranan Organisasi Internasional

Teori Peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentik peranan yang mana harapan tersebut tidak terbatas pada aksi (*action*) tetapi juga termasuk motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*), dan nilai-nilai (*values*) (Perwita&Yani,2014:30).

Menurut Mochtar Mas' oed menyatakan bahwa:

“Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut” (Perwita&Yani, 2014:30).

Kemudian peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam porsi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau konsep lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial.

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (seperti norma, harapan, larangan, dan tanggungjawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsi dalam organisasi.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai suatu instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negerinya, ataupun masalah dalam negeri dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita&Yani, 2014:95).

Organisasi internasional sebagai suatu instrumen, dipakai oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (*Inter Governmental Organization*) dimana anggota-anggotanya merupakan negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Maksudnya bahwa organisasi internasional tidak lebih dari instrument dari kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara-negara berdaulat. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional. Begitu pula halnya dengan WHO, sebagai institusi atau organisasi yang didirikan oleh PBB.

2.1.4 Kerjasama Internasional

Teori Hubungan Internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori Hubungan Internasional yang komprehensif (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauh mana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418-419).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik

internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Beranjak dari paparan sebelumnya, secara lebih jelas Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dipahami sebagai :

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya *national understanding* serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (Kartasasmita dan Koesnadi, 1997: 20).”

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di

dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat.

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. (Plano&Olton, 1979: 271).

Dengan begitu WHO disini melakukan kerjasama dalam bidang kesehatan bagi masyarakat diseluruh dunia melalui program-program atau kegiatan yang dibuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan WHO juga memiliki tujuan untuk mendorong dan membantu pelaksanaan penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan.

2.1.5 Human Security

Human Security merupakan satu dari isu-isu global kontemporer yang menjadi salah satu isu yang sangat serius untuk dibahas, baik di kalangan akademisi, maupun kalangan para pengambil kebijakan. Pasca Perang Dingin, isu *human security* baru mulai mendapat perhatian dari masyarakat luas di seluruh dunia setelah sebelumnya mengalami kegagalan di akhir Perang Dunia II.

Human Security juga ikut mengalami pergeseran sejalan dengan kemunculannya di dunia internasional. Konsep keamanan dari *human security* mengalami perubahan dari isu-isu militer dan politik menjadi fokus terhadap permasalahan dan kondisi yang terjadi dalam individu dan masyarakat dan pergeseran dari *national security* pada masa Perang Dunia I dan II, serta Perang Dingin menjadi *human security*.

United Nation Development Program (UNDP) dalam *Human Development Report 1994* merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama yang memperkenalkan konsep *human security*. Badan PBB berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibandingkan dengan konflik antarnegara. Berbeda halnya ketika kita kembali pada masa Perang Dunia

I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin yang diliputi oleh konflik antarnegara, sehingga masih terpusat pada *national security*.

Konsep *human security* lebih bersifat universal. Artinya, konsep keamanan ini tidak hanya terbatas pada sebuah negara saja, namun berlaku untuk umum. Bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengingat bahwa ancaman bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang negara mana manusia tersebut berada. Sebuah peristiwa pun dapat dikategorikan sebagai *human security* apabila telah sampai mengancam keamanan nasional suatu negara. Karena dari ancaman keamanan nasional, bukan tidak mungkin akan meluas hingga mencapai lingkup global.

Untuk itulah *human security* mengapa sangat mendapat perhatian di era saat ini, bahkan menjadi prioritas utama PBB untuk memberantas segala bentuk ancaman *human security* yang ada. Di sini peneliti melihat bahwa isu mengenai kesehatan juga menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan bisa juga menjadi ancaman global. Dengan begitu WHO menjadi organisasi PBB juga berperan dalam memberantas masalah menyangkut masyarakat yang menjadi ancaman bagi banyak umat di dunia.

Karena dengan adanya isu mengenai penyakit malaria ini, WHO bekerjasama dengan negara-negara yang tergabung sebagai anggota PBB salah satunya Indonesia untuk memberantas penyakit malaria agar keamanan terhadap manusia bisa teratasi lewat program yang sudah dibuat, dan *human security* ini juga menjadi ancaman terbesar bagi negara-negara yang sedang mendapatkan masalah mengenai kesehatan ataupun ancaman kesehatan terhadap warga negara khususnya di

Indonesia, dan hal itu yang menjadikan WHO memiliki tujuan untuk menyelesaikan isu kesehatan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional terjadi di antara negara-negara yang terjalin melalui hubungan kerjasama dan ditandai dengan konflik atau persaingan maupun permasalahan tertentu. Kerjasama dilakukan setiap negara untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh negara tersebut baik masalah regional maupun masalah internasional. Salah satu contoh kerjasama adalah kerjasama bilateral yaitu kerjasama antar dua negara atau dua pihak dengan tujuan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Tingginya tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit yang agak sulit untuk mengatasinya langsung akhirnya mengakibatkan terjadinya gangguan pada kesehatan masyarakat beberapa daerah di Indonesia. Karena itu, Indonesia masuk menjadi anggota WHO. WHO membuka kantor perwakilannya lagi di Indonesia agar dapat membantu pemerintahan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang melanda Indonesia. WHO sebagai organisasi internasional bentukan PBB yang bergerak dalam bidang kesehatan dunia, memiliki peran penting yang mengupayakan agar gangguan kesehatan pada masyarakat yang disebabkan oleh virus atau penyakit di Indonesia dapat teratasi, baik berperan sebagai arena atau sebagai instrumen.

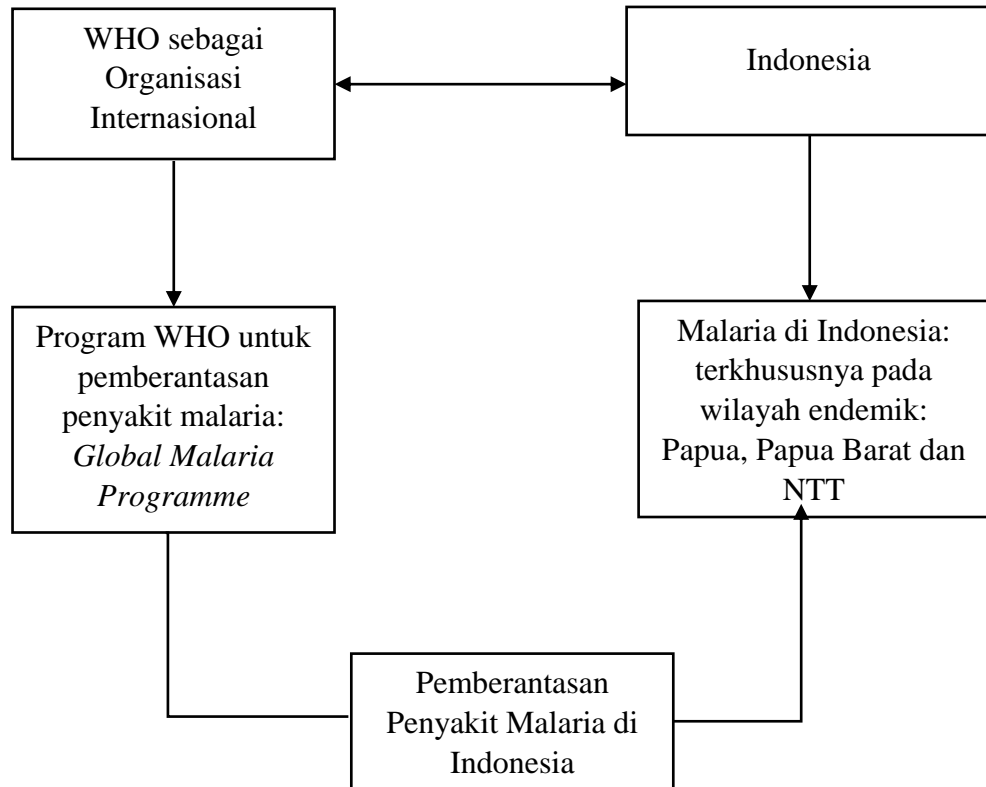
Dengan itu WHO yang merupakan organisasi internasional yang berguna untuk mencapai kompromi dan meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan permasalahan pada skala nasional maupun internasional. Dan juga menjadi salah

satu organisasi yang berupaya untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah internasional terkhususnya dalam bidang kesehatan di dunia. Melalui program yang telah dibuat yaitu *Global Malaria Programme* yang mana program bertujuan untuk pemberantasan penyakit malaria di dunia terutama di wilayah Indonesia.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah malaria menjadi isu penting di dunia internasional. Berdasarkan *World Malaria Report*, tahun 2013 terdapat 207 juta kasus malaria di dunia dan diperkirakan terdapat 627.000 kasus kematian akibat penyakit malaria. Walaupun sesungguhnya terdapat cara-cara dalam pencegahan malaria di dunia ini, hanya saja kurangnya kepedulian kesehatan dari masyarakat sendiri dan kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa daerah-daerah khususnya di daerah atau wilayah endemik di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, dan NTT yang merupakan wilayah intensitas tinggi terkena malaria.

Oleh karena itu, harapan Indonesia melalui program yang telah dibuat WHO dalam mengatasi masalah malaria dengan berbagai cara pencegahan yang dapat mencapai tujuan dari pengeliminasian malaria di dunia termasuk di wilayah endemik di Indonesia bisa cepat teratasi dan masyarakat dapat merasakan dampak baik tersebut.

Berikut adalah gambaran singkat kerangka pemikiran ini:



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran